

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan nasional bangsa Indonesia sebagai mana ditegaskan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan manusia seutuhnya mengandung pengertian bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tidak saja dalam bentuk pembangunan material, ekonomi ataupun sarana fisik melainkan tercapainya keseimbangan pembangunan antara aspek material dengan aspek mental spiritual lainnya, salah satu di antaranya adalah pendidikan. Hal tersebut merupakan perwujudan tuntutan dari cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia; mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan merata dengan berlandaskan pada falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya berbagai penemuan baru lainnya pada masa sekarang ini telah membawa pengaruh yang cukup besar pula bagi kehidupan manusia. Dampak dari kemajuan ini terutama ditandai dengan bertambahnya kebutuhan manusia. Guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini manusia dituntut untuk berbuat sesuatu, kalau tidak maka mereka akan tertinggal jauh dengan perkembangan kemajuan. Manusia dituntut agar selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan dan penemuan-penemuan baru, sedangkan usaha ke arah ini hanya dapat dilakukan melalui

pendidikan dan belajar. Kenyataan ini merupakan salah satu permasalahan dan tantangan yang dihadapi dunia pendidikan, baik dalam hubungannya dengan pendidikan formal (sekolah) maupun pendidikan nonformal (luar sekolah). Namun demikian tidak pula berarti kita menempatkan pendidikan, lebih-lebih pendidikan nonformal (luar sekolah) sebagai satu-satunya obat yang paling mujarab dan mampu menyembuhkan segala jenis penyakit, walaupun diakui bahwa eksistensi pendidikan bagaimana pun merupakan salah satu jalan keluar yang patut mendapat perhatian secara serius.

Anderson mengatakan, bahwa modernisasi hanya dapat dicapai dengan memperbaharui dan meluaskan pendidikan (Myron Weiner, Ed., 1984 : 16). Weiner lebih lanjut mengemukakan beberapa alasan mengapa pendidikan di negara-negara sedang berkembang sangat penting bagi modernisasi. Pertama; orang harus berpendidikan untuk mencapai kemajuan teknologi dan ekonomi. Untuk memproduksi bahan makanan, untuk menjalankan pabrik-pabrik, untuk menerapkan ilmu pengetahuan guna peningkatan taraf hidup, atau untuk berdagang di pasaran dunia, suatu negara haruslah memiliki sejumlah orang yang dilatih baik. Kedua; pendidikan diperlukan untuk menyatukan sejumlah orang dan sejumlah suku menjadi satu bangsa. Ketiga; berlangsungnya suatu negara modern hanya tergantung kepada kemampuan pegawai-pegawainya untuk mengkoordinasikan administrasi yang melingkupi wilayah yang luas. Oleh karena itu melalui pendidikan dapat dipersiapkan manusia-manusia

berkualitas tinggi guna mewujudkan modernisasi bangsa.

Keberadaan pendidikan ini semakin terasa apabila diperhatikan pada kecenderungan pembangunan nasional bangsa Indonesia pada masa sekarang ini yang lebih ditekankan pada pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam hubungan ini pendidikan ditempatkan pada suatu aspek yang sangat strategis, yaitu pada suatu proses pembinaan dan pengembangan sumber daya insani berkualitas tinggi dan dipandang mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Di sini pendidikan berfungsi sebagai proses pewarisan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Pemikiran yang dikemukakan di atas sejalan dengan tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia sebagaimana terungkap dalam Ketetapan MPR-RI No. II tahun 1983; pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Tujuan pembangunan pendidikan seperti digariskan dalam GBHN di atas tidak akan tercapai melalui penyelenggaraan sistem pendidikan persekolahan saja, mengingat berbagai keterbatasan yang dihadapi jenis pendidikan ini. Untuk menanggulangi permasalahan pendidikan ini diperlukan pengembangan

suatu jenis pendidikan lainnya. Dalam kaitan ini pendidikan luar sekolah dipandang sebagai salah satu alternatif yang paling tepat. Pandangan di atas didasarkan pada suatu asumsi bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hayat dan diselenggarakan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan harus dipikul secara bersama-sama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sehubungan dengan ungkapan di atas Reimer (1973) seperti diungkapkan kembali De Jong (1984 : 104) menyatakan, ...tak satu pun negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya akan pendidikan dalam bentuk sekolah saja. Pernyataan Reimer di atas menguatkan kecenderungan bagi lahirnya jenis pendidikan di luar sistem persekolahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan sangat penting artinya bagi perwujudan modernisasi suatu bangsa. Tinggi atau rendahnya pendidikan seorang individu atau kelompok masyarakat jelas akan mewarnai kelancaran pelaksanaan modernisasi pedesaan.

Bahren T. Sugihen (1985 : 1) pernah mengungkapkan, pengkajian tentang penyebaran suatu inovasi dalam suatu kelompok masyarakat dengan sendirinya perhatian kita terarah pada perubahan sosial yang terjadi, yaitu perubahan perilaku masyarakat petani atau masyarakat pedesaan (tradisional) yang umumnya terlibat dengan usaha tani. Para pengkaji percaya bahwa salah satu faktor penting yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial itu adalah inovasi, penyebaran dan adopsi teknologi baru (suatu masukan baru). Sedangkan

suatu teknologi yang baik adalah suatu masukan yang kondusif mengubah perilaku masyarakat ke arah yang diharapkan. Karena itu perubahan sosial dapat direncanakan dan diprogramkan secara seksama (Bahren T. Sugihen, 1985 : 1).

Setiap adanya perubahan dan penemuan baru pada suatu kelompok masyarakat atau setiap inovasi memasuki suatu kelompok akan menimbulkan permasalahan. Masyarakat yang terkena perubahan akan menanggapi perubahan yang terjadi dengan maksud mengadakan pertimbangan untuk menerima atau menolak inovasi yang dikembangkan. Proses penerimaan atau penolakan ini menimbulkan permasalahan dan kegoncangan kelompok yang menjelma dalam bentuk konflik sosial, baik konflik antar individu maupun antar kelompok. Permasalahan yang ditimbulkan inovasi semakin bertambah besar bilamana pendidikan dan pekerjaan yang digeluti penduduk di daerah pengembangan inovasi tidak mendukung pelaksanaannya. Adanya tanggapan pro dan kontra terhadap suatu perubahan sebagai akibat dari pandangan yang berbeda cenderung melemahkan keutuhan dan kesatuan kelompok yang pada akhirnya program-program pengembangan kemasyarakatan dan pembangunan pedesaan pada umumnya tidak dapat berjalan lancar. Dengan demikian tidak semua program pembaharuan dan perubahan akan membawa keberuntungan bagi masyarakat bahkan sebaliknya. Ini tidak lain sebagai akibat dari kondisi masyarakat yang belum mendukung pelaksanaan suatu pembaharuan.

Permasalahan seperti yang dikemukakan di atas dialami

para penduduk di Daerah Tingkat II Aceh Utara sejalan dengan berkembangnya berbagai proyek industri besar di daerah tersebut khususnya di daerah-daerah yang dijadikan tapak pembangunan industri. Kehidupan penduduk dari suatu daerah yang terpencil dan suram, tertinggal dan statis berubah menjadi suatu daerah penuh ceria, rakus bahkan berang serta penuh kedinamisan. Adanya uang ganti kerugian yang berlimpah ruah telah mengguncangkan kehidupan masyarakat di daerah itu. Hilangnya lapangan pekerjaan sebagian besar penduduk tradisional (pertanian), latar belakang pendidikan dan keahlian penduduk yang kurang mendukung bagi pengembangan industri teknologi tinggi, telah membuat kota Lhokseumawe dan sekitarnya semakin panas, bahkan hampir kehilangan keseimbangan. Tidak pula berlebihan kesempatan kerja bagi penduduk yang berasal dari luar daerah juga dipersoalkan, dengan tuntutan memperkerjakan putra-putri daerah. Tuntutan tersebut adakalanya terjelma dalam bentuk tindakan kekerasan oleh kelompok-kelompok tertentu terhadap tenaga kerja yang datang dari luar daerah terutama pada bidang-bidang pekerjaan yang dianggap mampu dikerjakan mereka.

Ditemukannya kekayaan sumber alam yang cukup besar di daerah Lhokseumawe telah memungkinkan lahirnya berbagai proyek industri besar dengan penggunaan gas alam sebagai bahan baku utama. Adapun beberapa industri besar yang telah dibangun di daerah ini adalah pabrik pencairan gas alam PT. Arun (PTA), pabrik pupuk urea PT. Pupuk Iskandarmuda I (PIM),

pabrik pupuk urea Asean Aceh Fertilizer (AAF). Dalam waktu dekat akan selesai pula pembangunan pabrik kertas Kraft Aceh, pabrik LPG serta pabrik pupuk urea PT. Pupuk Iskandar-muda II. Di samping tidak tertutup kemungkinan bagi pengembangan berbagai proyek industri hilir lainnya. Menurut perkiraan tim riset Institutional Development Assistance Project (IDAP) Negeri Belanda bekerjasama dengan Bappeda Tingkat I Daerah Istimewa Aceh, di samping hasil tim riset Indoconsult-redecon ternyata di kawasan Zona Industri Lhokseumawe (ZILS) akan bisa berkembang sebanyak 112 jenis industri dasar, menengah dan kecil (Prisma Nomor 7, 1987 : 85). Apabila perkiraan tersebut di atas dapat terlaksana jelas akan menda-tangkan harapan yang cukup besar bagi daerah ini dan negara dalam lingkup lebih luas.

Namun seperti disinyalir Abdullah Ali (1985) sesungguhnya kehadiran industri besar (LNG) di daerah Aceh diiba-ratkan munculnya sebuah pulau mewah di tengah-tengah samu-dera kemiskinan (Bahren T. Sugihen, 1985 : 22). Apa yang di-sinyalir Abdullah Ali di atas, ditinjau pada keadaan fisik lingkungan dan manusia penghuninya memang dapat dibenarkan. Kawasan yang puluhan tahun belakangan ini diam dan diseli-muti semak belukar dan rawa-rawa, dalam beberapa tahun saja telah disulap menjadi suatu kawasan industri moderen. Ling-kungan yang selama ini dijauhi karena dianggap angker dan sebagai tempat jin buang anak, kini menjelma menjadi suatu pemukiman yang ramai dan mewah. Oleh karena itu apabila

diperhatikan secara seksama, dewasa ini di kawasan industri Lhokseumawe benar-benar menampakkan wajah ganda dari suatu pemukiman. Di lingkungan sekitar industri bermukim penduduk setempat yang hidup dari pertanian dan perikanan laut atau petambak ikan dengan pola pengelolaan serba tradisional. Di sisi lain terlihat pula pemukiman-pemukiman karyawan industri yang mencerminkan gaya hidup mewah dan moderen. Dalam keadaan yang demikian terlihat pula cara berpikir dan cara bekerja tradisional dan kurang berdisiplin berbenturan dengan tuntutan modernisasi.

Ibrahim Hasan (1987) menyatakan masuknya industri-industri berskala besar ini memang cukup mengejutkan bagi Aceh. Bertahun-tahun sebelum diketemukannya minyak bumi di Lhokseumawe, dan gas alam di Arun, Lhokseumawe, Daerah Istimewa Aceh lebih dipersiapkan untuk menjadi daerah pertanian. Bahkan tidak tanggung-tanggung, diharapkan menjadi lumbung padi nasional. Itulah salah satu sebab mengapa segera dibuka Fakultas Pertanian di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh pada tahun 1966. Sekarang ternyata yang berkembang industri, dan yang banyak dibutuhkan orang-orang dari jurusan elektro dan mesin (Prisma No. 7, 1987 : 87). Namun keterkejutan paling kuat dirasakan penduduk Lhokseumawe, karena di sana seperti diungkapkan Dayan Daud (1987), hidup masyarakat dengan pendidikan dan pendapatan rendah. Mereka masyarakat yang terbelakang dengan mata pencaharian dari pertanian, peternakan, ataupun sebagai nelayan tradisional.

Dalam kondisi demikian tiba-tiba muncul industri padat modal dengan teknologi canggih (Prisma No.7, 1987 : 87).

Tingkat pendidikan rendah akan membawa pengaruh terhadap pemilihan lapangan pekerjaan penduduk, dalam hal ini mereka belum mampu beranjak dari pertanian, dan pada akhirnya pendapatan mereka pun akan tertinggal jauh dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja di industri. Kenyataan semacam ini akan mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial yang cukup besar di kalangan masyarakat. Perlakuan yang berlebihan terhadap para karyawan industri di mata masyarakat akan semakin memperlebar jurang pemisah antara kedua kelompok. Seperti kata salah seorang penduduk, mereka terlalu dimanjakan; coba saja, katanya "daging sapi untuk mereka saja harus didatangkan dari Australia atau Selandia Baru, bukan dari dalam negeri seperti Banda Aceh, atau Medan umpamanya" (Prisma No.7, 1987 : 92). Namun terlepas dari dimanja atau tidak, kenyataannya menunjukkan baik fasilitas maupun tatanan di kompleks perumahan karyawan industri jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan dengan perumahan penduduk di sekitarnya.

Terjadinya penggusuran penduduk pada daerah-daerah lokasi industri, walaupun dibarengi dengan ganti rugi uang di samping menyediakan pemukiman baru di Cot Mambong tetap belum mampu meleraikan permasalahan, bahkan permasalahan baru itu pun timbul, sebagai akibat dari latar belakang sosial ekonomi masyarakat yang kurang sesuai dengan pemilihan lokasi pemukiman baru. Dengan uang ganti rugi itulah mereka

bahkan tindakan demikian tidak mustahil menjelma sebagai ancaman bagi kelangsungan pembangunan yang sedang dilaksanakan, terutama dilakukan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan tempat untuk bekerja di industri.

Permasalahan lain yang dihadapi di Daerah Tingkat II Aceh Utara bahkan Daerah Istimewa Aceh pada umumnya adalah, bahwa dengan dibukanya Zona Industri Lhokseumawe menyebabkan terjadinya penyedotan tenaga kerja dari daerah Aceh lainnya, termasuk dari daerah pertanian. Mereka yang tersedot adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan sebagai petani, dan pada umumnya kaum pria. Akibatnya sektor pertanian mengalami kekurangan tenaga pria, karena mereka berbondong-bondong ke zona industri. Ibrahim Hasan (1987) mengkhawatirkan keadaan semacam ini akan terjadi feminisasi pertanian karena begitu banyaknya kaum wanita yang bekerja di sektor pertanian. Untuk mengimbangi munculnya zona industri tersebut maka pada masa sekarang ini di Daerah Istimewa Aceh sedang dipersiapkan pengembangan zona pertanian di Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Tenggara. Ini dimaksudkan untuk mencegah pindahnya orang-orang ke Aceh Utara yang memiliki sarana lebih baik dibandingkan daerah tingkat II lainnya, serta untuk menghindari terjadinya feminisasi pertanian (Prisma No.7, 1987 : 94-95). Sedangkan untuk pengembangan zona pertanian ini membutuhkan biaya yang cukup besar, untuk itu diusahakan melibatkan pihak-pihak swasta, dan sebagai leader di antara mereka adalah perusahaan-perusahaan

besar yang ada di ZILS. Penanaman modal oleh perusahaan-perusahaan besar ini dipandang sebagai suatu kewajiban dan diperlakukan sebagai bapak angkat (Ibrahim Hasan, Prisma No.7, 1987 : 95). Dengan cara demikian banyak permasalahan yang akan terselesaikan, sebab sektor pertanian adalah sektor yang baik membutuhkan teknologi tinggi.

Pengembangan berbagai proyek industri besar di daerah tingkat II Aceh Utara dipandang sebagai suatu inovasi oleh masyarakat di daerah itu di bidang industri. Dengan inovasi ini diharapkan dapat mendorong semangat dan kreativitas membangun di kalangan masyarakat. Hal ini tercermin dari tujuan dan arah pembangunan industri dalam REPELITA IV yang antara lain berbunyi: meningkatnya pembangunan industri yang dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah, dan memanfaatkan sumber alam dan energi serta sumber daya manusia; meningkatkan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan industri di daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi sumber daya alam, dengan pen-dayagunaan sumber daya manusia dan sumber-sumber pembangunan lainnya; meningkatnya pengembangan industri kecil dan kerajinan dalam membantu penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah sektor industri ... (Departemen Perindustrian RI, 1984 : 21-22). Namun pengembangan program industrialisasi di daerah tingkat II Aceh Utara cenderung pula menimbulkan permasalahan baru, seperti; menipisnya

semangat kegotong-royongan di kalangan masyarakat, bertambah tebalnya rasa ketergantungan masyarakat kepada pihak lain terutama pada industri dan lain sebagainya. Akhirnya kemandirian masyarakat sukar diwujudkan. Oleh karena itu proses industrialisasi pedesaan dengan bentuk sistem produksi yang tidak pro buruh (bersifat padat modal) dan dalam situasi adanya surplus tenaga kerja di sektor pertanian, ditambah dengan kelemahan-kelemahan struktural lainnya dalam suatu sistem sosial, tidaklah merupakan suatu proses transformasi yang menuju kepada kemajuan daerah pedesaan (Sritua Arif, 1978 : 128). Robinson (1979) seperti diungkapkan kembali Sritua Arif dan Adi Sasono (1981 : 129) mengatakan, bahwa membasmi kemiskinan melalui proses industrialisasi dengan mencontoh pola-pola yang diterapkan di negara-negara barat (negara maju) bagi negara-negara berkembang adalah tidak tepat, sebab negara-negara berkembang atau dunia ketiga membutuhkan akumulasi surplus yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka sendiri. Dengan demikian kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Aceh untuk mengembangkan zona pertanian menuju modernisasi pedesaan secara keseluruhan dipandang sebagai suatu langkah yang sangat tepat. Namun sejauh mana program tersebut akan berhasil tergantung kepada kesiapan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

Sebagai suatu inovasi, maka program industrialisasi di daerah tingkat II Aceh Utara, keberhasilannya ditentukan oleh banyak faktor baik yang bersumber dari luar ataupun

dari dalam. Dalam kaitan ini pendidikan dan pekerjaan yang melatarbelakangi pemuda atau penduduk di daerah tingkat II Aceh Utara cenderung pula mempengaruhi penerimaan inovasi industri yang dikembangkan di daerah itu. Anderson C. Arnold mengatakan, pendidikan adalah faktor yang penting bagi kemajuan (Myron Weiner, 1984 : 19). Pada bagian lain Anderson mengungkapkan, bahwa pendidikan sekolah merupakan sebagian saja dari keseluruhan pendidikan yang diperlukan bagi modernisasi (Myron Weiner, 1984 : 21). Pernyataan Anderson di atas menunjukkan bahwa tingkatan pendidikan seorang manusia besar pengaruhnya bagi perwujudan modernisasi suatu masyarakat, sedangkan pendidikan itu tidak cukup hanya pada kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sekolah, akan tetapi sangat ditentukan pula oleh jenis-jenis pendidikan tambahan yang diperoleh di luar sekolah. Namun sejauh mana latar belakang pendidikan para pemuda di daerah tingkat II Aceh Utara dapat mewarnai kecenderungan mereka dalam menerima inovasi industri yang dikembangkan di daerah tersebut baik formal maupun nonformal belum diperoleh gambaran secara jelas.

Dalam kaitannya dengan jenis pekerjaan di daerah Aceh Utara selama berlangsungnya pengembangan proyek-proyek industri besar telah terjadi pergeseran-pergeseran yang cukup berarti terutama dari bertani kepada sektor jasa dan karyawan industri. Kerja pada industri besar yang ada di zona industri Lhokseumawe dewasa ini telah menjadi incaran

utama kaum muda Aceh. Ini disebabkan masyarakat memberinya nilai sosial yang lebih tinggi kepada para pekerja di industri. Namun permasalahannya untuk bekerja atau menjadi karyawan di industri tidak semudah yang dibayangkan. Pada saat pembangunan konstruksi memang dapat menampung jumlah tenaga kerja yang cukup besar baik yang datang dari daerah Aceh Utara maupun daerah tingkat II lainnya bahkan mengundang tenaga kerja luar daerah Aceh guna mengadu nasib di daerah tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya pertambahan penduduk begitu dahsyat pada tahun-tahun tertentu. Namun setelah masa konstruksi sebagian dari mereka terpaksa dilepaskan kembali, karena industri dengan kapital intensif, kata Ibrahim Hasan (1987), dalam skala besar dan mempergunakan teknologi canggih tidak menampung atau memperkerjakan banyak orang. Ini memang menjadi masalah dualistis antara padat kerja dengan padat karya.

Sedikitnya tenaga kerja yang dapat diserap industri-industri berskala besar ini menyebabkan munculnya kekecewaan masyarakat terhadap industri, terutama setelah melihat banyak tenaga kerja yang terpaksa didatangkan dari luar daerah, karena yang dibutuhkan memang orang-orang yang ahli dan terampil dalam bidang-bidang tertentu. Menurut Dayan Daud (1987), hal ini merupakan salah satu sebab yang mendorong terjadinya kecemburuan dan ketimpangan sosial antara tenaga kerja asal daerah setempat dengan tenaga kerja pendatang (Prisma No.7, 1987 : 97-98). Untuk meredam masalah

kecemburuan sosial ini pemerintah daerah sudah berusaha meningkatkan pendidikan bagi putera-puteri daerah dengan berbagai pendidikan keterampilan, walau kenyataannya tidak semua mereka yang memperoleh pendidikan keterampilan ini dapat diserap industri. Oleh karena itu menurut M. Nazir(1987), Ketua Tim Pengendalian dan Pembangunan Wilayah Industri (TP2WI) Aceh Utara, jika sebuah industri akan dibangun sebaiknya terlebih dahulu memberitahukan berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan dengan keterampilan khusus seperti apa. Berdasarkan permintaan itu tenaga kerja yang diinginkan dapat disediakan atau dipersiapkan baik yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, atau dipersiapkan oleh pemerintah daerah (Prisma No.7, 1987 : 98). Dengan demikian keresahan masyarakat sebagai akibat dari penerimaan tenaga kerja daerah yang sangat terbatas dapat diatasi, walau pun disadari keresahan sosial itu tidak mampu tertanggulangi secara penuh, hal ini disebabkan karakter masyarakat yang lebih emosional menghadapi tenaga kerja yang datang dari luar. Dibentuknya TP2WI tahun 1983 dengan diberi wewenang untuk menetapkan strategi umum pembangunan dan pengembangan ZILS (Zona Industri Lhokseumawe dan Sekitarnya), mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan ZILS secara terpadu yang bekerjasama dengan instansi-instansi yang terkait merupakan salah satu jalan yang ditempuh untuk mengurangi keresahan sosial di daerah itu. Namun sejauh mana pengaruh atau sumbangan jenis pekerjaan pemuda atau penduduk di

daerah tingkat II Aceh Utara ini terhadap kecenderungannya dalam menerima inovasi industri, diperlukan suatu penelitian secara seksama.

Bilamana kita bermaksud menganalisis peranan yang dapat diberikan pendidikan (pendidikan luar sekolah) dalam konteks pembaharuan atau modernisasi pedesaan maupun pembangunan nasional secara keseluruhan, maka paling tidak akan diketemukan dua macam indikator pengukuran yang dipergunakan. Pertama; pendidikan luar sekolah sebagai subsektor dari sub-subsektor pembangunan; dan kedua pendidikan luar sekolah sebagai substitusi. Sebagai bagian atau subsektor pembangunan, pendidikan luar sekolah dalam hal ini dirancang dan diselenggarakan guna mendukung sub-subsektor pembangunan lainnya dalam suatu sistem pembangunan nasional yang bersifat makro. Sedangkan sebagai suatu substitusi, program-program pendidikan luar sekolah dalam hal ini dirancang secara tersendiri sesuai dengan kebutuhan nyata yang dialami pembangunan. Dalam kaitan ini pendidikan luar sekolah dapat pula berfungsi sebagai sarana pembinaan masyarakat menuju kepada modernisasi pedesaan, dan merupakan suatu kegiatan penting untuk mencapai tujuan konkret dalam batas waktu relatif singkat.

Premis utama yang dipergunakan di sini ialah bahwa hakekat modernisasi pedesaan itu dimulai dari suatu proses transformasi sikap dan sistem nilai yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat. Bahkan juga merupakan transformasi cara-cara berpikir dan berbuat serta gaya hidup manusia

terutama beranjak dari kondisi yang serba terbatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa modernisasi pedesaan pada hakekatnya merupakan suatu proses transformasi sosial-psikologis dalam diri individu kepada suatu sistem sosial yang diinginkan. Sedangkan transformasi yang dimaksudkan dalam tulisan ini mencakup penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau penggunaan cara-cara baru (inovasi) yang sangat diperlukan bagi pengembangan pedesaan, termasuk pengembangan dan pemanfaatan setiap potensi sumber daya yang terdapat di dalamnya secara maksimal dan optimal.

Menghubungkan pendidikan dengan proses modernisasi pedesaan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baru (inovasi), maka pendidikan di sini dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat kepada usaha-usaha perbaikan taraf hidup ke arah yang lebih baik melalui penggunaan cara-cara baru tersebut. Oleh karena itu pada tahap penyadaran ini, pendidikan baik formal ataupun nonformal memberikan andil yang cukup besar, yaitu membantu menyebarkan inovasi tersebut kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam kaitan ini pendidikan mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi adaptif dan fungsi sosialisasi (De Jong, 1984 : 66). Fungsi adaptif pendidikan berkenaan dengan peranan yang diberikan pendidikan guna mendukung usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai kemajuan di bidang ekonomi suatu masyarakat atau bangsa. Sedangkan fungsi sosialisasi pendidikan berkenaan dengan

pembinaan pribadi individu ke arah yang diinginkan. Dalam hal ini pendidikan merupakan suatu proses pembaharuan dan modernisasi masyarakat dalam arti luas, melalui pendidikan dapat diperkenalkan berbagai penemuan dan cara-cara kerja baru (inovasi) yang dibutuhkan bagi perwujudan kemajuan masyarakat.

Konsepsi De Jong di atas didukung Achmad Sanusi (1986). Achmad Sanusi mengemukakan, paling tidak terdapat dua fungsi utama pendidikan dikaitkan dengan pembangunan suatu bangsa. Kedua fungsi tersebut ialah; fungsi adaptif dan fungsi alokatif. Fungsi adaptif pendidikan berkenaan dengan penyelenggaraan berbagai program pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan lingkungan. Tugas lembaga pendidikan dalam hubungan ini menghasilkan orang-orang atau tenaga-tenaga menurut pesanan masing-masing lingkungan. Dalam fungsi ini pendidikan tidak mampu melepaskan diri dari suatu sistem pembangunan secara menyeluruh, jadi pendidikan merupakan salah satu subsistem dari sub-subsistem pembangunan lainnya. Fungsi alokatif pendidikan berkenaan dengan pembinaan perilaku individu atau masyarakat. Dengan demikian kemajuan yang dicapai seorang individu atau masyarakat ataupun suatu bangsa merupakan pencerminan dari penyelenggaraan pendidikannya. Oleh karena itu tingkat serta jenis pendidikan seorang individu atau kelompok ikut mewarnai taraf kehidupan individu atau kelompok tersebut. Namun disadari pula dalam setiap penyelenggaraan program-program pendidikan

## B. Rumusan Masalah

Berkembangnya proyek-proyek industri besar yang sifatnya padat modal dan menggunakan teknologi tinggi di tengah-tengah masyarakat tradisional seperti halnya masyarakat di daerah tingkat II Aceh Utara mendatangkan berbagai persoalan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kesiapan masyarakat untuk menyambut industri tersebut belum mendukung, antara lain disebabkan tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat rendah serta sebagian masyarakat di daerah itu berkisar pada sektor pertanian dengan pola pengelolaan serba tradisional pula. Sebagai akibat mereka belum mampu menyesuaikan diri dengan teknologi industri (inovasi industri) yang dikembangkan.

Adanya inovasi menyebabkan terjadinya perubahan sosial baik mengarah kepada hal-hal yang positif ataupun negatif. Demikian pula halnya dengan pengembangan inovasi industri di daerah tingkat II Aceh Utara di tengah-tengah masyarakat tradisional. Dampak negatif dari pengembangan inovasi industri lebih dirasakan, terutama mereka yang secara langsung terkena getahnya. Seperti hilangnya tanah adat yang merupakan hak milik penduduk, hilangnya lapangan pekerjaan sebagian penduduk, terancamnya nilai-nilai serta norma-norma panutan masyarakat dan sebagainya. Terganggunya keseimbangan perekonomian masyarakat, terganggunya keseimbangan sosial dan lingkungan, serta terjadinya kecemburuan sosial antara penduduk yang bekerja di luar industri dengan

karyawan industri sebagai akibat perbedaan tingkat pendapatan dan pendidikan. Namun sejauhmana kedua faktor tersebut (pendidikan dan jenis pekerjaan) memberikan kontribusi terhadap kecenderungan penerimaan inovasi industri ini diharapkan dapat terungkap dalam penelitian ini.

Oleh karena itu untuk mengarahkan pengumpulan data maka dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian seperti berikut ini:

1. Seberapa besar kontribusi atau sumbangan latar belakang pendidikan pemuda di daerah tingkat II Aceh Utara terhadap kecenderungan penerimaan inovasi industri?
2. Apakah terdapat perbedaan nyata tingkat kecenderungan penerimaan inovasi industri di kalangan pemuda di daerah tingkat II Aceh Utara menurut tingkat pendidikan mereka masing-masing?
3. Apakah terdapat perbedaan nyata tingkat kecenderungan penerimaan inovasi industri antara pemuda yang berpendidikan formal (sekolah) saja dengan pemuda yang juga memperoleh pendidikan tambahan (nonformal) di samping berpendidikan formal tertentu?
4. Seberapa besar kontribusi atau sumbangan lapangan pekerjaan pemuda di daerah tingkat II Aceh Utara terhadap kecenderungan penerimaan inovasi industri?
5. Apakah terdapat perbedaan nyata tingkat kecenderungan penerimaan inovasi industri di kalangan pemuda di daerah tingkat II Aceh Utara menurut lapangan pekerjaan mereka masing-masing?

maka pelaksanaan penelitian ini mempunyai tujuan:

1. Tujuan Umum; mengungkapkan berapa besar sumbangan atau kontribusi latar belakang pendidikan dan lapangan pekerjaan pemuda terhadap kecenderungan penerimaan inovasi industri di daerah tingkat II Aceh Utara.

Dengan mengetahui di mana letak kekuatan dan kelemahan setiap variabel yang diteliti maka akan terbuka peluang untuk menyusun rencana penyempurnaannya serta terbuka pula kemungkinan bagi pelaksanaan penelitian lebih lanjut. Akhirnya inovasi industri itu pun dapat diadopsi secara sempurna oleh pemuda dalam rangka perbaikan taraf kehidupan mereka sehari-hari. Tanpa mengetahui permasalahan yang dihadapi maka akan sukar bagi kita untuk menyusun rencana pengembangannya, terutama dalam batas-batas yang dapat dilakukan pendidikan luar sekolah.

2. Tujuan Khusus; mengungkapkan data berikut:
  - a. Sumbangan (kontribusi) latar belakang pendidikan pemuda terhadap kecenderungan penerimaan inovasi industri di daerah tingkat II Aceh Utara.
  - b. Perbedaan tingkat kecenderungan penerimaan inovasi industri di kalangan pemuda di daerah tingkat II Aceh Utara menurut tingkat pendidikan formal mereka masing-masing.
  - c. Perbedaan tingkat kecenderungan penerimaan inovasi industri antara pemuda berpendidikan formal (sekolah) saja dengan pemuda yang juga memperoleh pendidikan

yang sama? Ataukah penelitian ini mampu mendatangkan bahan masukan yang diperlukan bagi pengembangan masyarakat pedesaan pada umumnya dikaitkan dengan peranan yang mungkin disumbangkan pendidikan luar sekolah?

Penelitian tentang tingkat kecenderungan penerimaan inovasi industri pada pemuda di daerah tingkat II dipandang perlu untuk dilakukan. Berkembangnya berbagai industri besar di daerah Lhokseumawe telah mendatangkan berbagai perubahan yang cukup besar di daerah itu, baik yang mengarah kepada aspek positif maupun negatif. Adanya industri-industri besar telah mengakibatkan daerah ini tumbuh dan berkembang dengan pesat, pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dan sebagainya. Di samping itu berbagai dampak negatif lainnya juga timbul, terjadinya ketidakseimbangan ekonomi masyarakat, ketidakseimbangan sosial dan ketidakseimbangan lingkungan, serta berbagai masalah sosial kemasyarakatan lainnya. Timbulnya permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas paling tidak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan lapangan pekerjaan penduduk di daerah industri. Industri membutuhkan orang-orang terdidik dan memiliki keahlian tertentu sesuai dengan teknologi yang dikembangkan di industri. Tingkat pendidikan/keahlian yang rendah serta keterampilan kerja yang belum mendukung oleh masyarakat merupakan permasalahan yang dihadapi serta perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan masukan-masukan yang bersifat praktis bagi

7①

pemecahan masalah yang dihadapi. Akhirnya ketidakseimbangan yang terjadi secara berangsur dapat dipecahkan menuju pencapaian keseimbangan kembali.

Lebih khusus lagi penelitian diharapkan mendatangkan masukan-masukan yang diperlukan bagi penyusunan rencana pengembangan masyarakat pedesaan melalui jalur pendidikan luar sekolah. Dengan diketemukannya hambatan-hambatan yang dihadapi pemuda dalam mengadopsi inovasi industri terutama sebagai akibat tingkat pendidikan dan keterampilan yang belum mendukung, akan terbuka kemungkinan bagi penyelenggaraan program-program kegiatan yang sesuai dengan yang diharapkan. Yaitu program-program yang berkenaan dengan pemenuhan tenaga kerja di industri serta program pendidikan yang dapat menghasilkan manusia-manusia yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi penyelenggaraan program-program pendidikan dimaksud semata-mata didasarkan kepada kebutuhan yang dirasakan.

Dengan demikian manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari aspek teoritik maupun praktik. Dari segi teoritik penelitian ini mengarah kepada pemberian penilaian terhadap berbagai teori yang dikemukakan para ahli sebelumnya, membantah teori yang telah ada ataupun menambah dan menyempurnakan teori-teori tersebut. Di samping itu penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkapkan beberapa teori baru, terutama dengan melibatkan pendidikan luar sekolah dalam rangka penyebaran inovasi kepada khalayak sasaran. Dengan

diketemukannya faktor-faktor yang mendukung atau menghambat akan terbuka peluang bagi usaha-usaha pemecahan masalah dan faktor tersebut dapat pula dijadikan pegangan bagi penyebaran berbagai inovasi berikutnya.) Dengan diketemukan keterkaitan antar variabel yang diteliti, dan dipandang masih terdapat hal-hal yang belum terjawab secara tuntas dalam penelitian ini akan memberikan kesempatan dan peluang bagi pelaksanaan penelitian lebih lanjut.

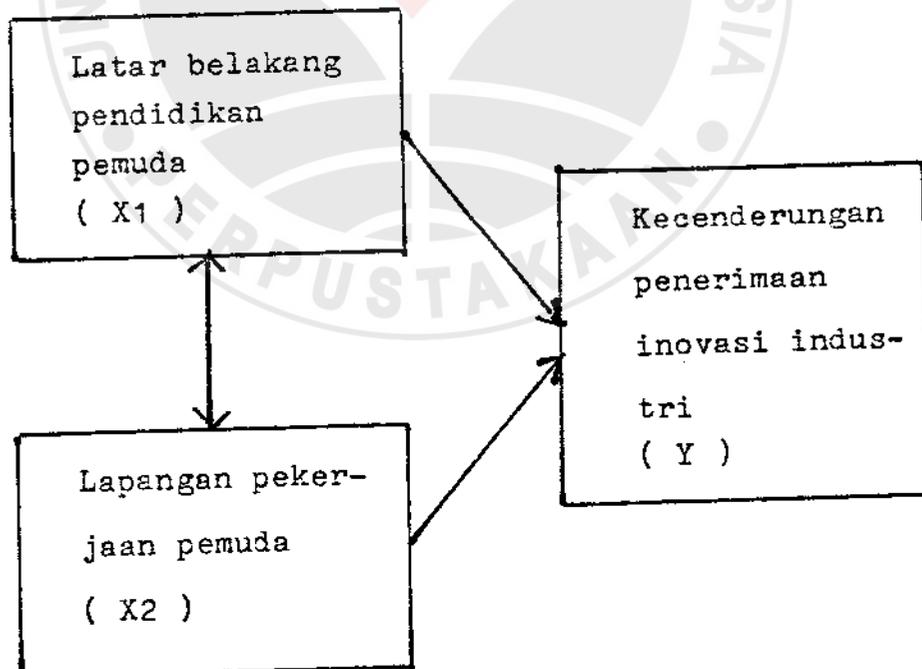
Dari segi praktik, penelitian ini diharapkan mampu mendatangkan masukan-masukan yang diperlukan bagi penyusunan rencana pengembangan masyarakat pedesaan pada umumnya. Masukan-masukan dimaksud terutama sangat berguna bagi para perencana pengembangan masyarakat pedesaan melalui jalur pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah. Berdasarkan masukan yang diperoleh dapat disusun rencana penyelenggaraan program-program pendidikan atas dasar kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Masukan yang dimaksudkan di sini berkenaan dengan pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam proses pengadopsian inovasi, mencakup program-program keahlian yang dibutuhkan, pendekatan yang mungkin ditempuh, prinsip satuan komando (management) yang mungkin dijalankan, pola hubungan kerja yang mungkin dijalin, strategi yang mungkin dilaksanakan, serta metode pelaksanaan yang dipandang sesuai dengan program dan kelompok sasaran yang dihadapi. Dengan demikian akan memberikan kesempatan kepada para perencana dan pengelola kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat .

pedesaan dalam menyusun dan menyelenggarakan program-program pembaharuan berikutnya, mengembangkan dan menyempurnakan program-program kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan.

Manfaat lain yang kemungkinan diperoleh melalui penelitian ini adalah dapat membangkitkan motivasi seluruh anggota masyarakat terutama para pemuda untuk melibatkan diri dalam kegiatan pembangunan pedesaan. Para pemuda yang merupakan salah satu unsur penting di dalam masyarakat memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan bagi pelaksanaan pembangunan. Pemuda merupakan generasi yang akan meneruskan cita-cita pembangunan bangsa termasuk dalam mengsucceskan program industrialisasi pedesaan atau dalam hal pengadopsian inovasi industri. Namun apabila para pemuda ini tidak memiliki tingkatan pendidikan atau keahlian yang mendukung kepada usaha tersebut, maka apa yang diharapkan dari mereka sukar diwujudkan. Oleh karena itu dengan mengetahui berapa besar sumbangan yang dapat diberikan setiap variabel independen terhadap variabel dependen, akan terbuka peluang bagi penyusunan rencana pengembangan unsur yang diteliti lebih lanjut. Dengan demikian pengembangan dan pemanfaatan unsur pemuda secara optimal dalam kegiatan pembangunan pedesaan jelas akan memberikan keuntungan ganda, yaitu mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara optimal dalam kegiatan pembangunan sekaligus membangkitkan motivasi membangun dari masyarakat khususnya para pemuda.

### E. Variabel Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan penelitian yang dikemukakan di atas terdapat beberapa yang akan diukur, yaitu; variabel pendidikan; lapangan pekerjaan; dan kecenderungan penerimaan inovasi industri (berupa perilaku adoptif inovatif). Variabel pendidikan dan lapangan pekerjaan' dijadikan sebagai variabel independen, kemudian diberi tanda "X", dan variabel kecenderungan penerimaan inovasi industri dijadikan variabel dependen yang kemudian diberi tanda "Y". Latar belakang pendidikan dijadikan sebagai variabel "X1", dan lapangan pekerjaan dijadikan sebagai variabel "X2". Apabila dijabarkan dalam bentuk bagan (skematis) akan terlihat seperti di bawah ini:



Kecenderungan sikap seseorang untuk menerima/melaksanakan atau menolak sesuatu pembaharuan (inovasi) dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersumber dari dalam maupun yang bersumber dari luar diri individu. Faktor dari dalam diri individu (intern) yang ikut mempengaruhi penerimaan suatu inovasi berkenaan dengan karakteristik individu (adopter), seperti; latar belakang pendidikannya, pekerjaannya, tingkat keinovativannya, kekosmopolitannya, fatalisme, motivasi untuk berprestasi dan lain sebagainya. Sedangkan faktor di luar diri individu (ekstern) yang ikut mempengaruhi penerimaan sesuatu perubahan (inovasi) berhubungan dengan pembaharuan atau inovasi yang dibawakan, sistem komunikasi yang dipergunakan, struktur sosial yang terdapat dalam suatu kelompok masyarakat, pertambahan penduduk (demografik), periode waktu yang digunakan dan sebagainya. Namun dalam penelitian ini tidak membahas kesemua faktor-faktor di atas, akan tetapi penulis membatasi diri pada latar belakang pendidikan dan lapangan pekerjaan pemuda (adopter) saja, yang diperhitungkan cukup memberikan pengaruh terhadap kecenderungan para pemuda menerima inovasi industri yang dilakukan di daerah tingkat II Aceh Utara.

#### 1. Latar Belakang Pendidikan

Indikator pengukuran yang digunakan adalah tingkat pendidikan formal yang pernah dialami masing-masing responden, seperti; SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat, Perguruan Tinggi, ataupun tidak sekolah sama sekali. Sedangkan yang menyangkut dengan pendidikan

namun pengetahuan pemuda (populasi) tentang industrialisasi ini masih dirasakan sangat kurang.

- b. Tahap menaruh minat; di mana seseorang mulai menaruh minat terhadap inovasi dan mencari informasi lebih banyak mengenai inovasi itu. Pada tahap ini para adopter mulai terkesan dengan informasi yang mereka dengar atau bukti nyata tentang sesuatu pembaharuan yang terjadi di sekelilingnya. Di samping itu para adopter terus berusaha mengumpulkan informasi lebih banyak tentang ide-ide baru yang dikembangkan. Dalam kaitan dengan inovasi industri para pemuda sudah tertarik dan berusaha mencari informasi lebih banyak tentang inovasi industri dalam rangka industrialisasi.
- c. Tahap penilaian; di mana seseorang mengadakan penilaian terhadap ide-ide baru itu yang dihubungkan dengan situasi dirinya sendiri saat ini dan masa mendatang serta menentukan untuk mencoba menerapkannya atau menolaknya. Para adopter menilai untung-rugi, baik-buruk, atau segi-segi lain yang bertalian dengan sesuatu hal yang dinilainya baru. Bahkan mereka juga menilai keserasian dan kecocokannya dengan norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi panutannya, ataupun panutan masyarakat di mana ia berada. Dalam kaitannya dengan inovasi industri di daerah tingkat II Aceh Utara para pemuda menilai apakah inovasi industri yang dikembangkan di lingkungan mereka lebih banyak menguntungkan ataupun mendatangkan kemudharatan bagi kelangsungan

hidup dirinya maupun masyarakatnya. Bilamana penilaiannya inovasi tersebut lebih menguntungkan maka akan diusahakan untuk menerapkannya serta berusaha mencari informasi lebih banyak sehingga inovasi tersebut mampu dipraktekkan dengan lebih baik. Sebaliknya apabila hasil penilaiannya lebih banyak mendatangkan kemudahan maka inovasi tersebut akan ditinggalkannya.

- d. Tahap percobaan; di mana seseorang menerapkan ide-ide baru itu dalam bentuk skala kecil untuk menentukan kegunaannya, apakah sesuai atau tidaknya dengan situasi dirinya. Pada tahap ini para adopter mencoba mempraktekkan ide-ide baru dalam perilaku nyata sehingga dapat mengetahui dengan jelas apakah cara-cara atau ide baru itu benar-benar lebih baik diterapkan dalam memperjuangkan kehidupannya sehari-hari. Bilamana hasil pencobaannya itu lebih baik, maka ide-ide baru di bidang industri akan diteruskan. Pada fase ini para adopter juga terus mencari informasi-informasi yang ada hubungannya dengan percobaannya itu untuk menguatkan keyakinannya tentang ide-ide baru di bidang industri yang akan dikembangkannya dan dilaksanakannya secara terus menerus.
- e. Tahap penerimaan (adopsi); di mana seseorang menggunakan ide-ide baru itu secara tetap dalam skala yang lebih luas. Pada tahap ini para pemuda (adopter) mampu dengan segera membuat keputusan untuk menerima secara fisik dan psikis sesuatu ide baru yang dianggap

menguntungkan berdasarkan pertimbangan sadar atau perilaku imitatif sehingga dipadukan dalam suatu sistem perilaku sehari-hari di bidang industri. Apapun alternatif yang dipilih dipandang lebih berguna dan bertalian dengan penerapan inovasi dalam jangka waktu relatif singkat. Pada fase ini para adopter juga mampu mencari alternatif lain bilamana alternatif yang menjadi keputusannya itu dipandang sudah tidak menguntungkan lagi.

#### F. Pengertian Istilah

Untuk tidak menimbulkan kesalahan pengertian tentang beberapa istilah yang diketemukan sebagai topik penelitian maka kiranya dirasakan perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut dalam bentuk operasionalnya.

1. Kontribusi; berasal dari kata "contribution" (Inggris) yang mengandung arti sumbangan atau iuran (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1984 : 145). Adapun sumbangan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah dukungan sesuatu aspek terhadap pelaksanaan atau kecenderungan memilih sesuatu. Dalam hal ini dukungan pendidikan dan lapangan pekerjaan seseorang pemuda bagi kecenderungannya menerima atau menolak inovasi industri di daerah tingkat II Aceh Utara. Apakah pendidikan dan pekerjaan pemuda yang melatarbelakanginya ada pengaruhnya terhadap penerimaan inovasi industri?

2. Pendidikan; adalah segala usaha yang dilakukan dalam rangka memanusiaakan manusia. Namun pendidikan yang

dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkatan pendidikan formal yang dimiliki masing-masing pemuda yang dijadikan responden penelitian, seperti; SD, SMTP, SMTA, dan Perguruan Tinggi. Sedangkan yang menyangkut dengan pendidikan non-formal adalah berapa banyak masing-masing responden pernah mengikuti program pendidikan ini, serta lama penyelenggaraan masing-masing program.

3. Lapangan Pekerjaan; yaitu bidang pekerjaan tetap yang dikerjakan para pemuda sehari-hari guna mendatangkan hasil bagi pemenuhan kebutuhannya setiap hari. Adapun bidang-bidang pekerjaan yang dimaksudkan di sini dibagi ke dalam jenis pekerjaan primer (petani atau nelayan), pekerjaan sekunder (Pegawai Negeri/ABRI/Karyawan, dan jenis pekerjaan tertier (Pedagang atau Wiraswasta), serta tidak mempunyai pekerjaan tetap (pengangguran).

4. Pemuda; adalah manusia usia muda yang berumur 15 - 30 tahun dengan masa transisi antara 30 - 40 tahun (W.F. Napitupulu, 1983 : 7). Pemuda yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah orang-orang usia muda yang berumur 15 - 35 tahun yang kemudian dijadikan populasi penelitian guna mengumpulkan data yang diperlukan, sejalan dengan penerimaan inovasi industri di daerah tingkat II Aceh Utara.

5. Kecenderungan; kecondongan hati, kesudian, keinginan (kesukaan) akan (Purwadarminta, 1985 : 197). Kecenderungan yang dimaksudkan di sini ialah kesediaan seseorang pemuda untuk mengadopsi inovasi industri, dengan berpedoman pada tahap adopsi inovasi yang dikemukakan Rogers & Shoemaker.

6. Inovasi Industri; inovasi ialah ide/gagasan, tindakan/praktek atau produk/barang yang dipandang baru oleh seseorang (Rogers and Shoemaker, 1971 : 19). Dengan demikian apapun yang dipandang baru oleh seseorang atau penerima dapat dikatakan inovasi. Sedangkan inovasi industri yang dimaksudkan di sini adalah merupakan ide atau gagasan atau cara/praktek yang dilakukan di industri dan dipandang baru oleh masyarakat tertentu. Oleh karena itu program industri-alisasi dengan pengembangan berbagai proyek-proyek industri besar di daerah tingkat II Aceh Utara yang seterusnya dijadikan sebagai zona industri merupakan inovasi bagi masyarakat di daerah itu. Ide atau praktek-praktek baru yang dilakukan di industri besar adalah inovasi dan inovasi industri ini baru dikenal masyarakat semenjak diketemukannya sumur gas alam di daerah Lhokseumawe pada tahun 1971, sedangkan pembangunannya sendiri baru dilakukan pada tahun 1974 dan masa-masa berikutnya berkembang pula berbagai industri besar lainnya.

7. Zona Industri Lhokseumawe; merupakan daerah yang ditetapkan menjadi lokasi pembangunan proyek-proyek industri di daerah tingkat II Aceh Utara. Daerah tersebut terdiri dari lima kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Kuta Makmur.

8. Daerah Tingkat II Aceh Utara; merupakan salah satu daerah tingkat II yang terletak di bagian pantai utara propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan ibu kotanya Lhokseumawe.

### G. Pembatasan Penelitian

Kecenderungan seseorang dalam menerima suatu program pembaharuan atau inovasi pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun dalam penelitian ini tidak kesemua faktor yang mempengaruhi penerimaan inovasi industri diteliti. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan, baik menyangkut masalah waktu, dana dan kemampuan. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan kesan yang tidak diinginkan, maka dirasa perlu untuk dibatasi penelitian yang dilakukan, yaitu terbatas pada mempelajari kontribusi (sumbangan) latar belakang pendidikan dan lapangan pekerjaan pemuda terhadap kecenderungan penerimaan inovasi industri di daerah tingkat II Aceh Utara.

Di samping itu mengingat wilayah yang diteliti maupun populasi penelitian terlampau luas, perlu pula mengambil sampel penelitian. Oleh karena itu penelitian ini hanya dilaksanakan pada dua kecamatan. Masing-masing kecamatan di ambil lima buah desa (gampong), dan masing-masing desa (gampong) diambil 20 orang pemuda (pria dan wanita) untuk dilakukan penelitian. Sehingga dari dua kecamatan atau 10 desa (gampong) akan terhimpun 200 pemuda yang dijadikan responden. Adapun teknik pengambilan sampling dilakukan secara acak (random).